

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal, 2013, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Balck, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn: West Publishing Co.
- Fuady, Munir, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hartini, Rahayu, 2007, *Hukum Kepailitan*, Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Huizink, J.B., *Insolventie*, Terjemahan Linus Doludjawa, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum UI.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi, Kartini, 2001, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga*, Bandung : Alumni.
- Nating, Imran, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prasetya, Rudhi, 2002, *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Shubhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan Cet I*, Jakarta: Kencana.

Sinaga, Syamsudin M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2016, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Jakarta: Prenadamedia Group.

-----, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Subhan, Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana.

Surakhmad, Winarno, 1982, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.

Suyadi, Aria, dkk., 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta: Dimensi.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

### **C. Putusan Pengadilan:**

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 67/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 18 Juli 2014.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 67/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 23 Oktober 2013.

Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 67/Pdt.Sus.PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 23 Februari 2016.

Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 67/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2015.

Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 67/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 November 2014.